



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 9 Juni 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021; dan - Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 34 (tiga puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI/Kepala BNPP C. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, hari Rabu, 9 Juni 2021, dibuka pukul 10.18 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar **Rp3.040.285.956.000,-** (*tiga trilyun empat puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp18.480.629.000,-** (*delapan belas milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*). Dan usulan tambahan anggaran Tahun 2022 Kemendagri sebesar **Rp1.902.833.508.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp247.680.529.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
3. Mendagri menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 Kemendagri sebesar Rp.1.161.216.969.963,- (*satu trilyun seratus enam puluh satu milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.3.095.796.916.000,- (*tiga trilyun sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*) atau sebesar 37.51%.
4. Ketua DKPP RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 DKPP sebesar Rp.10.390.222.356,- (*sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.17.303.307.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 39.95%.

5. Kepala BNPP RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 BNPP sebesar Rp73.735.478.158,- (*tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp214.943.093.000,- (*dua ratus empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*) atau sebesar 34.30%.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar **Rp3.040.285.956.000,-** (*tiga trilyun empat puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp18.480.629.000,-** (*delapan belas milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp247.680.529.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya.
3. Terhadap usulan tambahan anggaran Tahun 2022 yang disampaikan Kemendagri sebesar **Rp1.902.833.508.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah*) untuk kebutuhan mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut yang selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.

4. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut:
- a. Kemendagri sebesar Rp.1.161.216.969.963,- (*satu trilyun seratus enam puluh satu milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.3.095.796.916.000,- (*tiga trilyun sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*) atau sebesar 37.51%.
 - b. DKPP sebesar Rp.10.390.222.356,- (*sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.17.303.307.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 55.95%.
 - c. BNPP sebesar Rp73.735.478.158,- (*tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp214.943.093.000,- (*dua ratus empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*) atau sebesar 34.30%.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, DKPP, dan BNPP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 11 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.32 WIB.

 Jakarta, 9 Juni 2021
KETUA RAPAT


Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH

A-142